

Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Junaedi^{a*}

^aUniversitas Muhammadiyah Makassar,
Email: junaedi@unismuh.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 22 Juni 2025

Revised : 16 Juli 2025

Accepted : 24 Juli 2025

Kata Kunci: Netralitas ASN,
Pemilu 2024, Jurdil, Luber,
Pelanggaran Pemilu

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The neutrality of civil servants (ASN) is crucial to ensure that the 2024 General Election is conducted fairly and democratically under the principles of Jurdil (honest and fair) and Luber (direct, general, free, and confidential). However, a survey by Kurious Katadata Insight Center (KIC) revealed that many citizens doubt the government's seriousness in maintaining ASN neutrality, with vulnerability identified in 22 provinces, especially North Maluku, North Sulawesi, Banten, and South Sulawesi. Findings from the SINGKAP NGO Coalition recorded 59 alleged violations by ASN between May–November 2023, including misuse of authority, open support for candidates, and covert campaigning. These cases highlight the urgent need for stronger oversight to uphold ASN neutrality and safeguard the integrity of the 2024 election.

ABSTRAK

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan faktor penting agar Pemilu 2024 berjalan dengan prinsip Jujur, Adil (JURDIL) serta Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER). Namun, hasil survei Kurious Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan masih banyak publik menilai pengawasan netralitas ASN belum serius, dengan potensi kerawanan di 22 provinsi, terutama Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan beberapa provinsi lain. Data Koalisi NGO SINGKAP mencatat 59 kasus dugaan pelanggaran ASN periode Mei–November 2023, mencakup penyalahgunaan otoritas, dukungan terbuka kepada kontestan, hingga kampanye terselubung. Fakta ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan netralitas ASN guna mencegah penyimpangan yang berpotensi merusak legitimasi Pemilu 2024.

LATAR BELAKANG

Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, artinya ASN itu: (1). Bebas Intervensi; (2). Bebas Konflik Kepentingan; (3). Objektif; (4). Security Solutions; (5). Tidak Memihak; (6). Bebas Pengaruh.

Nilai dasar ASN meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Kode etik dan kode perilaku mengatur agar ASN melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan peruruan, sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundangan dan etika pemerintahan. Menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan ketentuan disiplin ASN.

Asas Netralitas ASN

Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (*Vide Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014*)

Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Adapun regulasi yang mengatur Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Netralitas Apartur Negara (ASN/TNI/Polri/Yudikatif/Kepala Daerah/BUMN/BUMD/Kepala Desa& aparutnya), yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan Pemeritah No. 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Dalam Pasal 11 huruf c, dinyatakan, bahwa: “Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik”.

2) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Dalam Pasal 4 angka 12 – 15, dinyatakan, bahwa: “PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres”.

3) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Namun dalam pelaksanaan jauh panggang dari api, dimana kontestasi demokrasi 2024 perlu terjaganya dan dijaga Netralitas ASN dan aparatur negara lainnya (ASN/TNI/Polri/Yudikatif/Kepala Daerah/BUMN/BUMD/Kepala Desa & aparutnya), sehingga pemilu 2024 berjalan dengan JURDIL (Jujur & adil), LUBER (Luas, umum, bebas rahasia). Penguatan tidak netralitasnya ASN di pemilu 2024 terbukti berdasarkan Survei terbaru Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, masih banyak publik yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam mengawal netralitas aparatur sipil negara atau ASN di Pemilu 2024

Menurut definisi dari Bawaslu, kerawanan pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan ini diukur melalui empat indikator utama, yakni:

- 1) Dimensi sosial dan politik meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, serta otoritas penyelenggara negara.
- 2) Dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu.
- 3) Dimensi kontestasi meliputi hak dipilih dan kampanye calon.
- 4) Dimensi partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Potensi kerawanan tersebut ditemukan di 22 provinsi Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 10 provinsi yang memiliki indeks kerawanan pelanggaran netralitas ASN tertinggi, yakni Maluku Utara dengan perolehan skor 100 dari skala 0-100. Skor, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua, diikuti Banten, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Kerawanan netralitas ASN di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mencapai 91,59 dari skala 0-100, Majalengka 67,14, Tasik 65,42, Cirebon 64,79.

Kota Bandung menjadi wilayah dengan IKP terendah di Tanah Pasundan, yaitu 11,96. Setelahnya Depok, 13,22, Bekasi 14,55. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 9 di antaranya masuk kategori kerawanan tinggi (IKP 49,33-100), 16 masuk kategori rawan sedang (IKP 13,47-49,32), serta 2 masuk kategori rawan rendah (IKP 0-13,46).

Jumlah Kasus Penyimpangan ASN pada Pemilu 2024 menurut Jenis Pelanggarannya (Mei-November 2023). Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) yang terdiri dari KontraS, Setara Institute, Imparsial, dan KPPOD mencatat, terdapat 59 kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024 dalam periode Mei-November 2023.

Menurut jenisnya, kasus yang paling banyak dijumpai pada ASN, antara lain:

- 1) Aparatur negara secara masif terbuka menyalahgunakan otoritas dan sumber daya yang melekat pada diri mereka untuk bertindak secara tidak adil melalui pemihakan pada kontestan tertentu;
- 2) Pelanggaran oleh kepala desa, Polri, dan kepala dinas
- 3) Pelanggaran netralitas, yakni sebanyak 32 kasus;
- 4) Kasus kecurangan pemilu sebanyak 24 kasus dan pelanggaran profesionalitas 4 kasus;

Dukungan ASN terhadap kontestan tertentu (40 tindakan); dukungan pejabat terhadap kontestan (7 tindakan); serta kampanye terselubung (4 tindakan);

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah: "Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024"?

Teknik Pengumpulan ini menggunakan Penelusuran Data Online / Internet searching, browsing, surfing ataupun downloading data, Buku-buku, majalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, Desertasi, berita online, media, website dan Sumber-sumber dari para ahli yang terkait hal-hal yang berhubungan dengan "Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) merupakan salah satu dari empat isu kerawanan pemilihan umum (pemilu) yang banyak ditemukan di tingkat provinsi¹.

Koodinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan, potensi kerawanan tersebut ditemukan di 22 provinsi Indonesia.

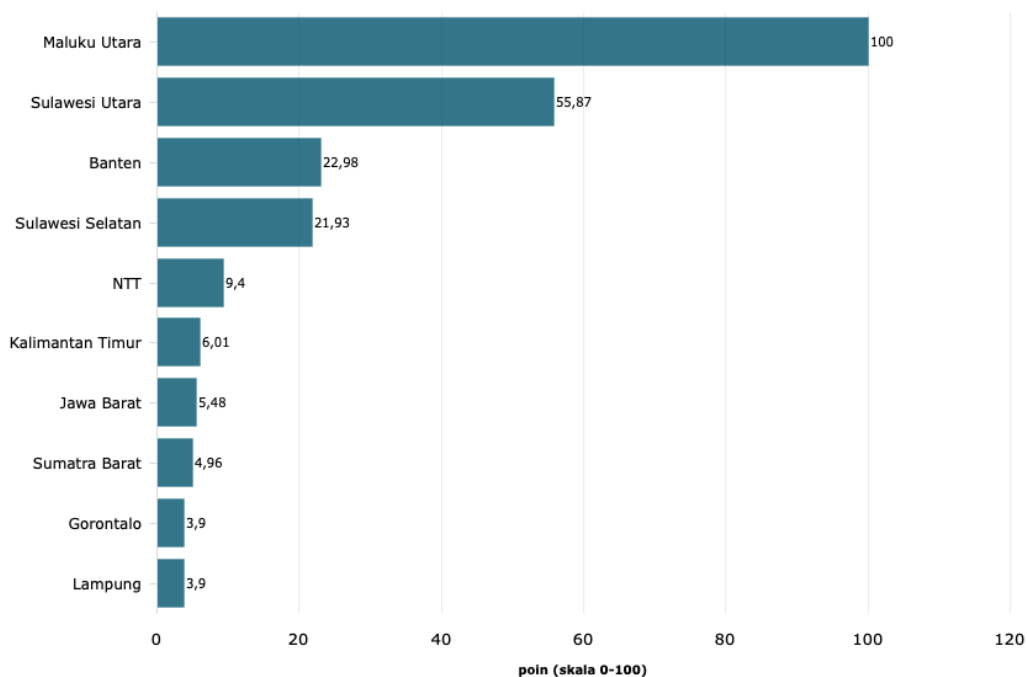
Dari jumlah tersebut, ada 10 provinsi yang memiliki indeks kerawanan pelanggaran netralitas ASN tertinggi, yakni Maluku Utara dengan perolehan skor 100 dari skala 0-100. Skor yang rendah menunjukkan kerawanan yang rendah, dan begitupun sebaliknya.

Kemudian Sulawesi Utara berada di peringkat kedua, diikuti Banten, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, dan Lampung dengan indeks kerawanan seperti terlihat pada grafik.

Lolly berharap, pemerintah daerah dari sepuluh provinsi dengan potensi kerawanan tersebut dapat melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran (Lolly dalam acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, katadata.co.id, Kamis, 21/9/2023). Ia juga memaparkan, pelanggaran netralitas ASN kerap terjadi dalam bentuk mempromosikan calon tertentu, serta pernyataan dukungan terbuka di media sosial maupun media lainnya.

Ada pula kasus ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta terlibat dalam kampanye calon. "Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, 10 Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.19 WIB



Katadata

databoks

Gambar 1. Provinsi dengan indeks kerawanan netralitas ASN tertinggi pada pemilu 2023

2. Wilayah Jawa Barat dengan Kerawanan Pemilu Tertinggi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Bandung mencapai 91,59 dari skala 0-100 pada 2022².

IKP tersebut merupakan yang tertinggi dibanding 26 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Wilayah Jawa Barat dengan IKP tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Majalengka 67,14, Kabupaten Tasik 65,42, serta Kabupaten Cirebon 64,79.

Adapun Kota Bandung menjadi wilayah dengan IKP terendah di Tanah Pasundan, yaitu 11,96. Setelahnya ada Kota Depok dengan IKP 13,22 dan Kabupaten Bekasi 14,55. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 9 di antaranya masuk kategori kerawanan tinggi (IKP 49,33-100), 16 masuk kategori rawan sedang (IKP 13,47-49,32), serta 2 masuk kategori rawan rendah (IKP 0-13,46).

² <https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar>, 10 Wilayah Jawa Barat dengan Kerawanan Pemilu Tertinggi, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.21 WIB

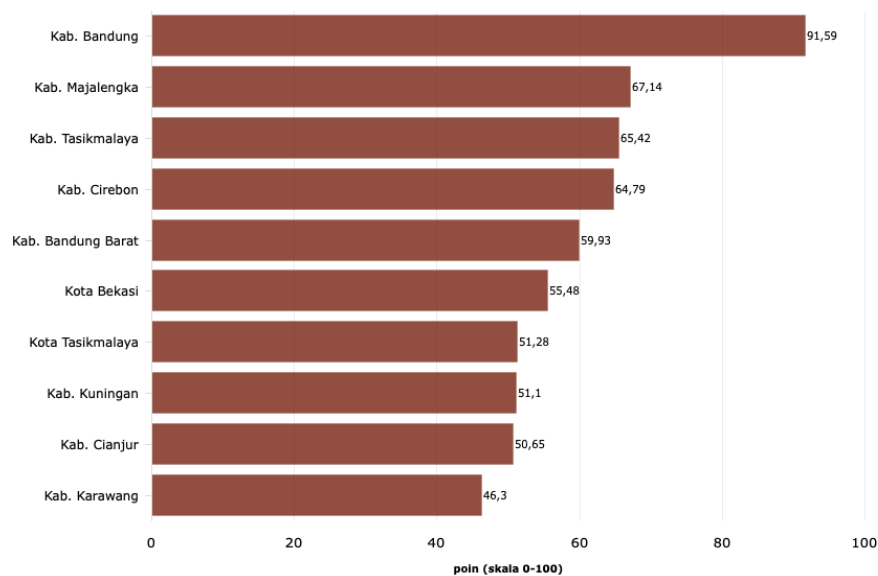
Menurut definisi dari Bawaslu, kerawanan pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan ini diukur melalui empat indikator utama, yakni:

- 1) Dimensi sosial dan politik meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, serta otoritas penyelenggara negara.
- 2) Dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu.
- 3) Dimensi kontestasi meliputi hak dipilih dan kampanye calon.
- 4) Dimensi partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Berikut daftar lengkap IKP kabupaten/kota di Jawa Barat (2022), diurutkan dari yang kerawanannya tertinggi sampai terendah:

- (1) Kab. Bandung: 91,59
- (2) Kab. Majalengka: 67,14
- (3) Kab. Tasikmalaya: 65,42
- (4) Kab. Cirebon: 64,79
- (5) Kab. Bandung Barat: 59,93
- (6) Kota Bekasi: 55,48
- (7) Kota Tasikmalaya: 51,28
- (8) Kab. Kuningan: 51,10
- (9) Kab. Cianjur: 50,65
- (10) Kab. Karawang: 46,30
- (11) Kota Sukabumi: 46,09
- (12) Kab. Bogor: 45,83
- (13) Kab. Garut: 38,95
- (14) Kab. Ciamis: 36,23
- (15) Kab. Sukabumi: 32,64
- (16) Kab. Sumedang: 31,66
- (17) Kab. Indramayu: 30,75
- (18) Kab. Subang: 30,73
- (19) Kota Cirebon: 28,45
- (20) Kota Cimahi: 26,17

- (21) Kota Bogor: 21,55
- (22) Kab. Pangandaran: 21,41
- (23) Kota Banjar: 19,83
- (24) Kab. Purwakarta: 18,65
- (25) Kab. Bekasi: 14,55
- (26) Kota Depok: 13,22
- (27) Kota Bandung: 11,96



Gambar 2. Indeks kerawanan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2022)

3. Presiden Joko Widodo Tidak Serius Jaga Netralitas Pemilu ASN

Survei Kurious: 25% Responden Ragu Jokowi Serius Jaga Netralitas Pemilu ASN. Pendapat Responden soal Keseriusan Jokowi Mengingat ASN Netral dalam Pemilu 2024 (November 2023)

Survei terbaru Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, masih banyak publik yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam mengawal netralitas aparatur sipil negara atau ASN di Pemilu 2024.³

Dari 1.002 responden, 25% responden meragukan komitmen Jokowi untuk menjaga netralitas Pemilu ASN. Rinciannya, ada 7,1% sangat tidak serius, 17,9% tidak serius.

Di sisi lain, survei Kurious menunjukkan sebanyak 75% responden menilai Jokowi serius untuk menjaga netralitas ASN di Pemilu 2024. Dari jumlah itu sebanyak 52,4% menyatakan Jokowi serius dan 22,7% sangat serius.

³ <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.23 WIB

Sebelumnya, Jokowi menekankan agar seluruh ASN pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri."Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral (Jokowi dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara, katadata.co.id, Rabu,1/11/2023).

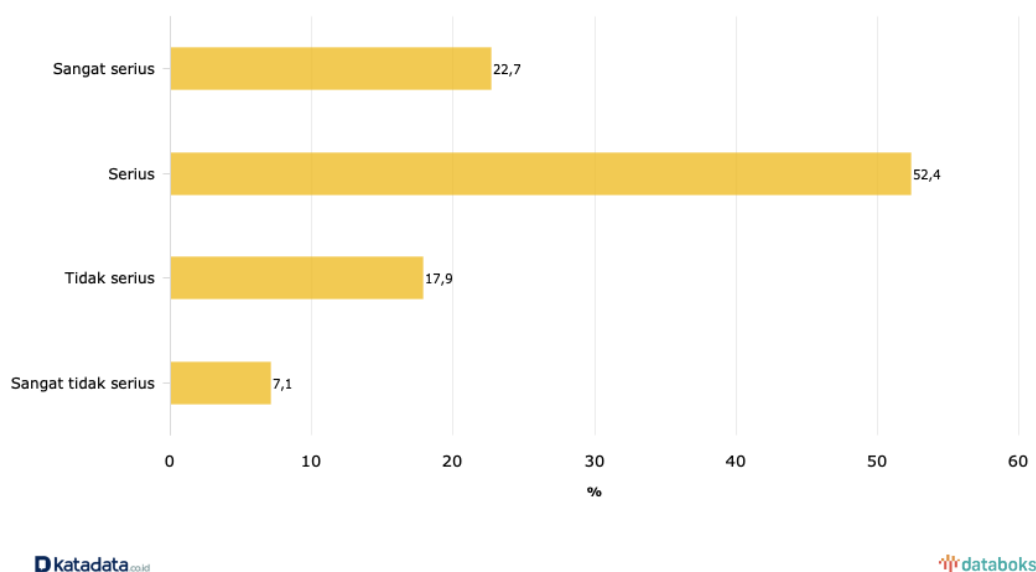
Survei Kurious-KIC ini melibatkan 1.002 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 54,1% responden laki-laki dan 45,9% responden perempuan.

Mayoritas 64,1% responden berasal dari Pulau Jawa selain Jakarta, diikuti responden dari DKI Jakarta (16,1%), dan Pulau Sumatra (13,3%).

Sementara, proporsi responden yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua berkisar 0,2-2,3%.

Responden didominasi oleh kelompok usia antara 25-34 tahun (41,80%), diikuti kelompok 35-44 tahun (26,8%) dan kelompok 45-54 tahun (13,6%).

Pengambilan data dilakukan pada 3-6 November 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%.



Gambar 3. Pendapat Responden soal keseriusan Jokowi Mengingatkan AS N netral dalam pemilu (November 2023)

4. Kasus Dugaan Penyimpangan ASN

Jumlah Kasus Penyimpangan ASN pada Pemilu 2024 menurut Jenis Pelanggarannya (Mei-November 2023). Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) yang terdiri dari KontraS,

Setara Institute, Imparsial, dan KPPOD mencatat, terdapat 59 kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024 dalam periode Mei-November 2023⁴.

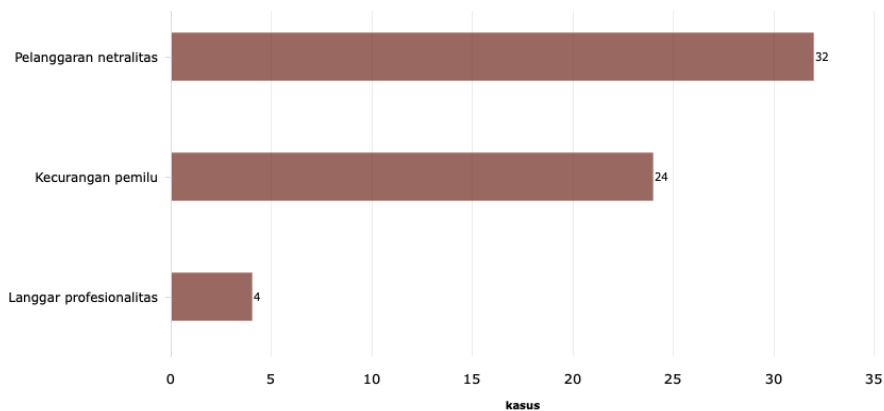
Menurut jenisnya, kasus yang paling banyak dijumpai pada ASN adalah pelanggaran netralitas, yakni sebanyak 32 kasus. Kemudian disusul oleh kasus kecurangan pemilu sebanyak 24 kasus dan pelanggaran profesionalitas 4 kasus.

Turunan dari kasus-kasus tersebut yakni adanya tindakan yang menyimpang. Tindakan penyimpangan yang tercatat oleh SINGKAP di antaranya dukungan ASN terhadap kontestan tertentu (40 tindakan); dukungan pejabat terhadap kontestan (7 tindakan); serta kampanye terselubung (4 tindakan).

Adapun menurut pelakunya, kasus penyimpangan ASN pada Pemilu 2024 didominasi oleh ASN pemerintah kabupaten, yaitu sebanyak 10 tindakan. Diikuti pelanggaran oleh kepala desa, Polri, dan kepala dinas masing-masing 5 tindakan.

Ini menunjukkan aparatur negara secara masif terbuka menyalahgunakan otoritas dan sumber daya yang melekat pada diri mereka untuk bertindak secara tidak adil melalui pemihakan pada kontestan tertentu (Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, CNN Indonesia, Kamis, 30/11/2023).

Metode penghitungannya, tim menghimpun dari pelaporan publik melalui Google Form dan desk study. Untuk menjamin validitas data pemantauan, SINGKAP menggunakan teknik triangulasi pada pelaporan, hasil desk review, dan pendalaman data oleh Jaringan Pemantauan daerah.



Gambar 4. Jumlah kasus penyimpangan ASN pada Pemilu 2024 menurut jenis pelanggarannya (Mei-November 2023)

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, Ada 59 Kasus Dugaan Penyimpangan ASN, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.16 WIB.

PENUTUP / KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan demokrasi 2024 perlu terjaganya Netralitas ASN dan aparaturnya lainnya, sehingga pemilu 2024 berjalan dengan JURDIL (Jujur & adil), LUBER (Luas, umum, bebas rahasia). Penguatan tidak netralitasnya ASN di pemilu 2024 terbukti berdasarkan Survei terbaru Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, masih banyak publik yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam mengawal netralitas aparat sipil negara atau ASN di Pemilu 2024

Menurut definisi dari Bawaslu, kerawanan pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan ini diukur melalui empat indikator utama, yakni:

- 1) Dimensi sosial dan politik meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, serta otoritas penyelenggara negara;
- 2) Dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu;
- 3) Dimensi kontestasi meliputi hak dipilih dan kampanye calon; dan
- 4) Dimensi partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Potensi kerawanan tersebut ditemukan di 22 provinsi Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 10 provinsi yang memiliki indeks kerawanan pelanggaran netralitas ASN tertinggi, yakni Maluku Utara dengan perolehan skor 100 dari skala 0-100. Skor, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua, diikuti Banten, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Kerawanan netralitas ASN di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mencapai 91,59 dari skala 0-100, Majalengka 67,14, Tasik 65,42, Cirebon 64,79.

Kota Bandung menjadi wilayah dengan IKP terendah di Tanah Pasundan, yaitu 11,96. Setelahnya Depok, 13,22, Bekasi 14,55. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 9 di antaranya masuk kategori kerawanan tinggi (IKP 49,33-100), 16 masuk kategori rawan sedang (IKP 13,47-49,32), serta 2 masuk kategori rawan rendah (IKP 0-13,46).

Jumlah Kasus Penyimpangan ASN pada Pemilu 2024 menurut Jenis Pelanggarannya (Mei-November 2023). Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) yang terdiri dari KontraS, Setara Institute, Imparsial, dan KPPOD mencatat, terdapat 59 kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024 dalam periode Mei-November 2023.

Menurut jenisnya, kasus yang paling banyak dijumpai pada ASN, antara lain:

- 1) Aparatur negara secara masif terbuka menyalahgunakan otoritas dan sumber daya yang melekat pada diri mereka untuk bertindak secara tidak adil melalui pemihakan pada kontestan tertentu;
- 2) Pelanggaran oleh kepala desa, Polri, dan kepala dinas
- 3) Pelanggaran netralitas, yakni sebanyak 32 kasus;
- 4) Kasus kecurangan pemilu sebanyak 24 kasus dan pelanggaran profesionalitas 4 kasus;

- 5) Dukungan ASN terhadap kontestan tertentu (40 tindakan); dukungan pejabat terhadap kontestan (7 tindakan); serta kampanye terselubung (4 tindakan).

DAFTAR PUSTAKA

<https://si-asn.bawaslu.go.id/Netralitas> ASN, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, pukul 08.49 WIB.
<https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, 10 Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.19 WIB
<https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar>, 10 Wilayah Jawa Barat dengan Kerawanan Pemilu Tertinggi, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.21 WIB
<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.23 WIB
<https://databoks.katadata.co.id/index.php/profile/nabilah-muhamad>, Ada 59 Kasus Dugaan Penyimpangan ASN, dikases pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 22.16 WIB.
Research, (February), 120–123. <https://doi.org/10.1097/00006199-199103000-00014>